



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISKANDAR ZULKARNAEN SIREGAR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KONEKTIVITAS GLOBAL, KERJASAMA DAN ALUMNI
3. NHK : 664383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.611.530.880

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 417.768.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/75 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 183.079.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m²/62 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 662.734.000
4. Bangunan Seluas 36.69 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Bangunan Seluas 35 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 694.704.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/49 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 927.666.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/83 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.260.579.880

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.966.000

1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA / MAGA10R-BRXLBD 2.0 G CVT / MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 302.966.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.291.050.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.293.169.787
F. HARTA LAINNYA	Rp.	9.000.000
Sub Total	Rp.	7.762.216.667
III. HUTANG	Rp.	300.434.357
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.461.782.310

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.